

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN
OBJEK WISATA DI DESA KARANG ANYAR HUTA IX
KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI

OLEH

NURUL MUSRIFAH

218520022



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/12/25

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN
OBJEK WISATA DI DESA KARANG ANYAR HUTA IX
KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

OLEH :

NURUL MUSRIFAH

218520022

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

ii

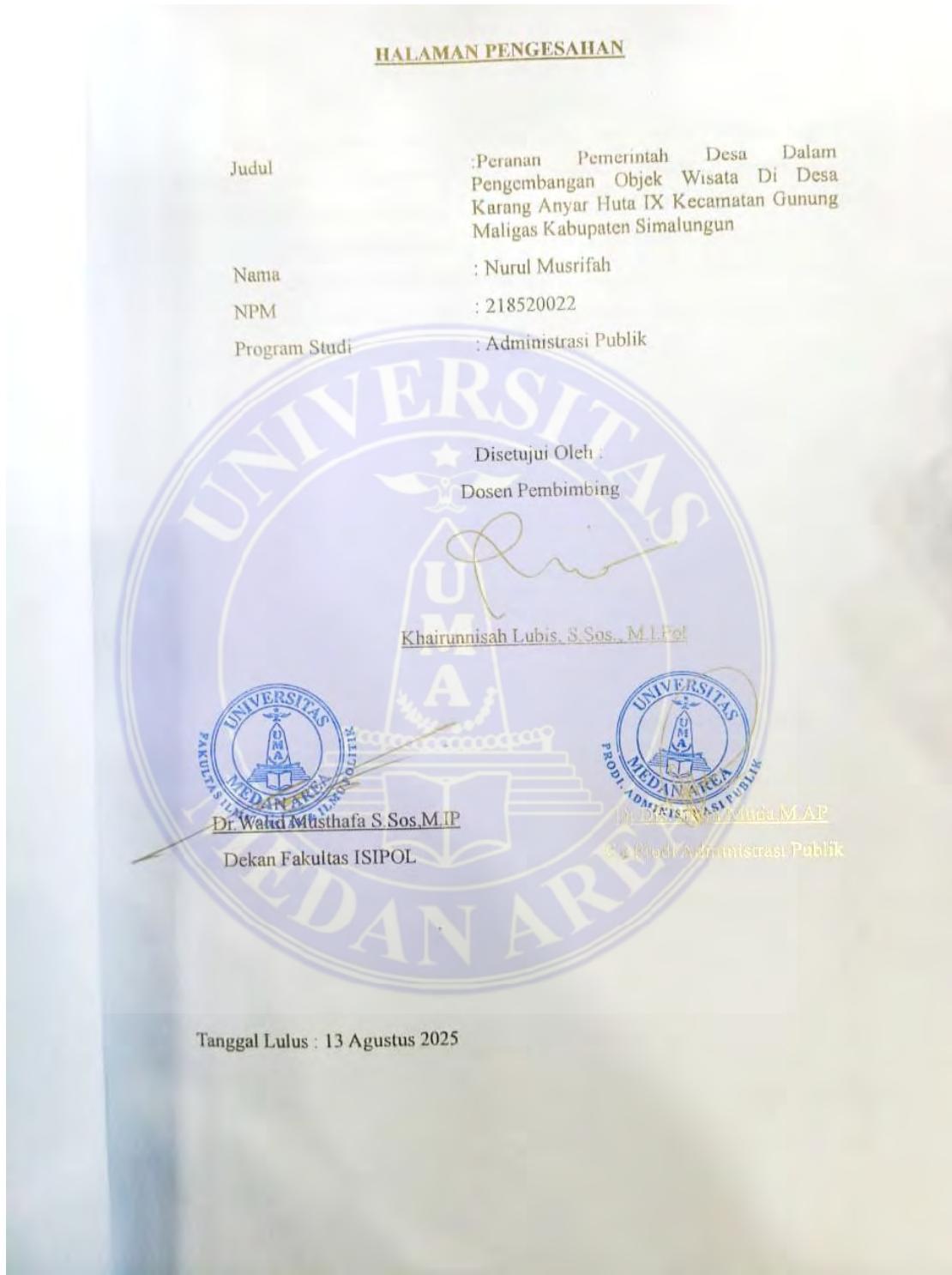
Document Accepted 5/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/12/25

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Karang Anyar Huta IX Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun
Nama : Nurul Musrifah
NPM : 218520022
Program Studi : Administrasi Publik



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 13 Agustus 2025



Nurul Musrifah

218520022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Nurul Musrifah
NPM	:	218520022
Program Studi	:	Administrasi Publik
Fakultas	:	Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jenis Karya	:	Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (non-exclusive Royalty-Free Right) karya ilmiah saya yang berjudul: "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Karang Anyar Huta IX Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun". Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : Agustus 2025
Yang Menyatakan :

Nurul Musrifah
218520022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata di Desa Karang Anyar Huta IX, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, studi ini menggunakan teori peran menurut Tjokroamidjojo yang mengandung tiga indikator yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator dalam mendukung pengembangan destinasi wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya meningkatkan potensi wisata melalui berbagai kegiatan dan kolaborasi dengan masyarakat serta pihak ketiga. Namun, terdapat kendala seperti Tingkat partisipasi Masyarakat yang rendah dan kurangnya ketersediaan dana dalam penyediaan fasilitas penunjang wisata. Secara keseluruhan, keberhasilan pengembangan objek wisata sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak dan pengelolaan yang efektif dari pemerintah desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pentingnya peran pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi wisata lokal secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Peranan Pemerintah Desa, Pengembangan Objek Wisata



ABSTRACT

This research aims to examine the role of the village government in the development of tourist attractions in Karang Anyar Huta IX Village, Gunung Maligas District, Simalungun Regency. Through a qualitative approach using data collection techniques of observation, interviews, and documentation, this study employs the role theory according to Tjokroamidjojo, which encompasses three indicators: as a motivator, facilitator, and mobilizer in supporting the development of tourist destinations. The research findings show that the village government has made efforts to enhance tourism potential through various activities and collaborations with the community and third parties. However, there are challenges such as low community participation and a lack of available funds for providing supporting tourism facilities. Overall, the success of developing tourist attractions heavily depends on the collaboration of all parties and the effective management by the village government.

Keywords: *Role of the Village Government, Development of Tourist Attractions*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Nurul Musrifah, kelahiran 28 Januari 2003 di Desa Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari Bapak Hendri Setiarso dan Ibu Jaliah. Penulis menganut agama Islam. Penulis pernah menempuh Pendidikan di RA Al- Hidayah Karang Anyar pada tahun 2007, Pendidikan di SD 094153 Karang Anyar pada tahun 2008, Pendidikan di MTsN Pematang Siantar pada tahun 2014, Pendidikan di SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar pada tahun 2017. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan selanjutnya di Universitas Medan Area dengan mengambil fokus pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik.

Atas rasa Syukur dan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, doa dan dukungan dari keluarga, dosen, teman-teman dan pihak terkait, penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Karang Anyar Huta IX kecamatan Guung Maligas Kabupaten Simalungun” .

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos., M.I.Pol selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan arahan. Rasa hormat penulis sampaikan kepada Bapak Safi'i Ma'roef selaku kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, Bapak Jumali selaku ketua BUMNag Desa Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kbaupaten Simalungun yang telah membantu penulis untuk melengkapi proses penelitian. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Ayah dan Ibu, adik, keluarga, kerabat, pasangan, sahabat, teman-teman serta orang-orang terkasih atas segala doa dan dukungannya.

Penulis mengetahui bahwa skripsi ini masih banyak menyimpan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran membangun demi kerampungan skripsi ini. Harapan ke depan semoga skripsi ini memberi kebermanfaatan baik untuk banyak orang.

Medan, 4 Desember 2024

Nurul Musrifah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Peranan.....	11
2.2 Pengembangan	15
2.2.1 Pengembangan Objek Wisata.....	16
2.3 Pemerintah Desa.....	20
2.3.1 Peranan Pemerintah Desa.....	24
2.4 Pelayanan Publik	27
2.4.1 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik.....	28
2.5 Regulasi.....	30
2.6 Penelitian Terdahulu.....	31
2.7 Kerangka Berpikir	36

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

X

Document Accepted 5/12/25

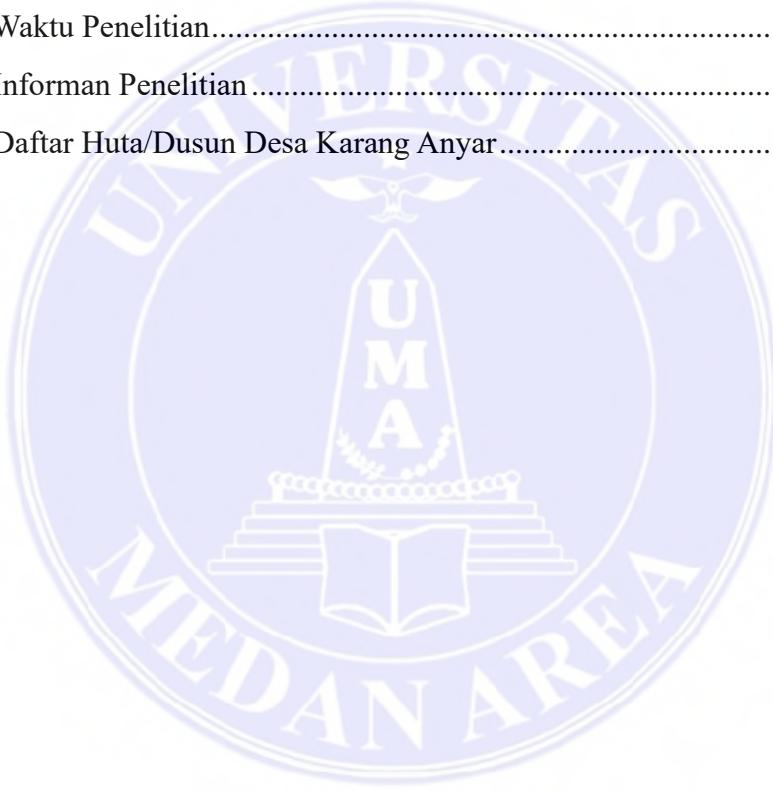
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	39
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	39
3.2.2 Waktu Penelitian	40
3.3 Informan Penelitian.....	40
3.4 Sumber Data.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum	46
4.1.1 Visi dan Misi	48
4.1.2 Struktur Organisasi	49
4.2 Hasil Penelitian	51
4.2.1 Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun....	51
4.2.2 Faktor Penghambat Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Karang Anyar Huta IX Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun	65
4.3 Pembahasan.....	71
4.3.1 Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Karang Anyar Huta IX Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun	71
4.3.2 Fator Penghambat Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Karang Anyar Huta IX Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1 Kesimpulan	84

5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah kunjungan wisatawan pada Kawasan objek wisata di Desa Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun	4
Tabel 2. Harga tiket masuk objek wisata Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun	5
Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 4. Waktu Penelitian.....	40
Tabel 5. Informan Penelitian	41
Tabel 6. Daftar Huta/Dusun Desa Karang Anyar	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Objek wisata Karang Anyar sebelum dan sesudah dikembangkan	5
Gambar 2. Fasilitas di objek wisata Karang Anyar.....	7
Gambar 3. Kerangka Berfikir.....	37
Gambar 4. Lokasi objek wisata Karang Anyar	39
Gambar 5. Struktur Organisasi Desa Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun	50
Gambar 6. Pasar Murah UMKM (Usaha mikro, kecil, dan menengah)	53
Gambar 7. Kantor Desa Karang Anyar	99
Gambar 8. Objek Wisata Karang Anyar.....	99
Gambar 9. Wawancara Bersama Informan Kunci.....	100
Gambar 10. Wawancara Bersama Infoman Utama	100
Gambar 11. Wawancara Bersama Informan Tambahan (Masyarakat Desa)	101
Gambar 12. Wawancara Bersama Informan Tambahan (Penjual di objek wisata) ...	101
Gambar 13. Wawancara Bersama Informan Tambahan (Pengunjung)	102



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

X

Document Accepted 5/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/12/25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara	89
Lampiran II Dokumentasi	99
Lampiran III Surat Izin dan Selesai Riset/Penelitian	103
Lampiran IV Regulasi	105



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan kategori mempunyai keanekaragaman serta kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Secara kondisi geografis, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan didalamnya juga terdapat ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Keindahan serta keanekaragaman inilah yang menjadi salah satu daya tarik dalam dunia pariwisata Indonesia, hal inilah yang dapat memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia serta mendorong pembangunan Nasional. Maka dari itu, Pembangunan dan pengembangan pariwisata di Indonesia harus dilakukan dengan merata keseluruh plosok daerah (Bella Pertiwi, 2023).

Sektor Pariwisata merupakan sektor yang pengembangannya sangat memiliki potensi terhadap sumber penghasilan daerah. Hal ini telah termaksud didalam Undang-Undang No.10 tahun 2009 mengenai Undang-Undang Kepariwisataan, bahwa tujuan pelaksanaan kepariwisataan adalah untuk menaikkan penghasilan nasional sehubungan dengan peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat, peluang usaha dan lapangan pekerjaan dengan kesempatan yang sama, memajukan pembangunan daerah dengan menghadirkan dan menggunakan destinasi wisata di Indonesia, menumbuhkan cinta tanah air serta memperkuat persahabatan antar bangsa.

Peraturan pemerintah No.24/1979 objek wisata merupakan perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup ,seni budaya serta Sejarah bangsa dan tempat keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi. Sebuah kawasan destinasi wisata kini dapat mengelola kawasannya sendiri, penataan, pemeliharaan dan berbasis kearifan lokal di kawasannya, termasuk pariwisata. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah, mengemukakan bahwasannya suatu kawasan dialokasikan wewenang serta kebebasan dalam menetapkan kemana arah pengembangan ekonominya sendiri. Keberadaan pariwisata diharapkan dapat memberikan efek berganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian daerah bagi seluruh daerah, mulai dari pengambil keputusan, operator hingga pemilik destinasi wisata.

Pemerintah Desa merupakan pemerintahan level terkecil sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan masyarakat, maka dari itu status desa dalam proses pembangunan sangat penting karena, desa merupakan daerah yang harus dimaksimalkan. Pemerintah Desa harus memberikan program-program pembangunan, pelatihan dan menyediakan sarana infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan desa yang berguna untuk memenuhi unsur pemerataan Pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan Masyarakat (Diah Mariatul Restia, 2024)

Pemerintah Desa bertanggung jawab secara langsung serta memelihara masyarakatnya untuk mempertahankan standar kualitas hidup yang layak maka

pemerintah desa diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ukuran utama dalam memperkuat daerah terletak pada sejauh mana individu di wilayah tersebut memiliki kemauan dan kemampuan untuk berperan aktif dalam sistem penguatan. Setiap Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan lokal (Lia Andriyani, 2024).

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Kecamatan Raya yang resmi didirikan pada tanggal 23 juni 2008. Kabupaten ini memiliki 32 kecamatan dengan luas 438.660 ha atau 6,12% dari luas wilayah provinsi Sumatra Utara. Gunung Maligas adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Simalungun yang terdiri dari 9 desa/kelurahan. Dalam (Mirna Yunita, 2020) Desa Wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki ciri khas tertentu yang menjadikannya sebagai tujuan wisata. Ciri-ciri tersebut meliputi tradisi, budaya, makanan khas, sistem pertanian, dan sistem sosial yang masih terjaga dan memberi nilai tambah bagi pengalaman wisatawan.

Desa Karang Anyar merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun yang memiliki objek wisata alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Memerlukan waktu tempuh 120 menit atau 2 jam dari Kota Medan. Karang Anyar memiliki arti“ Perkarangan Baru” yang memiliki aliran mata air bah pamujian yang dulunya menjadi tempat pemujaan masyarakat setempat yang mata airnya berasal dari danau Toba. Pada tahun 1970 Desa Karang Anyar menjadi salah satu ikon wisata alam yang banyak diminati oleh pengunjung

(kemenparekraf.go.id). Wisata ini memiliki suasana yang sangat asri dan nyaman untuk dikunjungi. Saat ini destinasi wisata Karang Anyar sudah lebih berkembang dari tahun sebelumnya hal ini tentunya sangat perpengaruh terhadap meningkatnya kunjungan dari para wisatawan. Jumlah kunjungan wisata Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun dapat diketahui melalui Tabel 1 Berikut :

Tabel 1. Jumlah kunjungan wisatawan pada kawasan objek wisata di Desa Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun

No	Bulan	Jumlah Wisatawan
1.	Januari	6.500
2.	Februari	3.800
3.	Maret	3.700
4.	April	24.941
5.	Mei	13.353
6.	Juni	11.669
7.	Juli	8.400
8.	Agustus	5.133
9.	September	6.033
	Total	83.579

Sumber : Data BUMNAG Karang Anyar, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1. dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Karang Anyar pada bulan Januari lebih banyak dibandingkan bulan februari dan maret. Jumlah kunjungan paling meningkat terjadi pada bulan april dikarenakan cuti lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah namun tidak bertahan lama sehingga mengalami penurunan kembali. Oleh karena itu Objek Wisata Karang Anyar harus terus melakukan pengembangan agar nantinya minat pengunjung meningkat. Objek wisata Karang Anyar yang dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Objek Wisata Karang Anyar

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Pada gambar 1. diatas terlihat adanya perubahan di lokasi destinasi wisata di Desa Karang Anyar yang berkembang cukup baik disebabkan dari dilakukannya pengembangan daerah di lokasi wisata pemandian Karang Anyar yang saat ini menjadi objek wisata utama yang dimiliki oleh Desa Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. Adapun harga Tiket masuk ke wisata karang anyar adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Harga Tiket Masuk Objek Wisata Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun

NO	HARGA	KETERANGAN
1.	Rp. 3.000	Per Orang
2.	Rp. 5.000-10.000	Parkir Roda 2 & 4

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Pada tabel 2. diatas dapat dilihat untuk harga tiket masuk objek wisata Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, harga tiket masuk mulai dari Rp. 3.000 sampai dengan Rp. 10.000 tergantung kategori pengunjung yang datang.

Dari hasil pra wawancara dengan salah satu ketua BUMNAG Anyar Lestari (Badan Usaha Milik Nagori) tiket yang dikutip merupakan iuran kebersihan. Harga tiket masuk per orang sebesar Rp. 3.000 dibagi sebesar Rp.1.000 ke dana Desa dan Rp. 2.000 untuk pengelolaan kebersihan dan kemanan di objek wisata Karang Anyar. Dalam hal ini Pemerintah Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pengembangan objek wisata dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran keinginan masyarakat.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 Tentang Desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa mencakup pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat desa . Pemerintah Desa Karang Anyar membentuk BUMNAG (Badan Usaha Milik Nagori) untuk pengembangan objek wisata Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

Pengembangan objek wisata di Karang Anyar memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat setempat, di mana masyarakat aktif terlibat baik secara langsung (seperti pengelolaan parkir, pemandu wisata, dan pengurus objek) maupun tidak langsung (seperti membuka warung kopi dan makan). Keterlibatan ini membantu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, menciptakan peluang usaha, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga pariwisata menjadi strategi efektif untuk mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup.

Pemerintah Desa Karang Anyar Bersama BUMNAG (Badan Usaha Milik Nagori) Anyar Lestari sudah memiliki beberapa kegiatan sebagai upaya dari meningkatkan kualitas objek wisata diantaranya meliputi infrastruktur seperti pembangunan tembok anti banjir dan menutup saluran air pada jalan masuk area wisata, daya tarik wisata dengan menambahkan tempat seperti tempat teduh atau biasa disebut pondok, membuat jembatan penyebrangan, menambah kamar mandi kecil untuk para wisatawan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengembangan usaha seperti melatih pelayanan bagi pengunjung (Bella Pertiwi, 2023).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatra Utara Tahun 2017-2025 pasal 1 (13) menyebutkan bahwa fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata. Berdasarkan dari hasil pra observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 19 oktober 2024 ditemukan bahwa fasilitas di objek wisata Karang Anyar masih belum maksimal seperti pada gambar 2. dibawah ini :



Gambar 2. Fasilitas di objek wisata Karang Anyar

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Terdapat pada gambar 2. sebelumnya bahwa kondisi fasilitas di objek wisata Karang Anyar kurang terawat seperti kamar mandi di tempat wisata sudah banyak yang rusak, jembatan yang penyebrangan tidak layak untuk dilewati, musholla atau tempat ibadah yang tidak terawat dan kotor, pondok atau tempat teduh sudah banyak yang rusak dan terbengkalai serta sampah yang masih berserakan. Dari hasil pra observasi tersebut dapat dikatakan bahwa wisatawan atau pengunjung yang berliburan di wisata Karang Anyar belum dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh pengelola karena terlihat di objek wisata tersebut fasilitas-fasilitas yang disediakan kondisinya sudah rusak. Dari hasil pra wawancara dengan salah satu penjual di objek wisata Karang Anyar (LT) bahwasannya tidak adanya pengelola kebersihan sehingga sampah-sampah banyak yang menumpuk dan mengganggu pengunjung serta dalam sebulan terakhir sampah masing-masing dikutip dan dibawa pulang oleh para penjual karena tidak adanya petugas kebersihan.

Pemerintah Desa dengan mengikutsertakan masyarakat seharusnya berupaya untuk mengembangkan objek wisata agar lebih banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Namun Pemerintah Desa Karang Anyar pada dasarnya masih membutuhkan perbaikan serta pengembangan yang berkelanjutan, kurangnya perkembangan pada objek wisata tersebut disebabkan oleh masih belum optimalnya tata kelola dalam membangun potensi-potensi di lokasi wisata tersebut (Carol Ratna Alyssa Nainggolan, 2022). Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dan mengambil judul yaitu “**Peranan**

Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Karang Anyar

Huta IX Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Karang Anyar Huta IX Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun?
2. Apa saja Faktor Penghambat yang dihadapi Pemerintah Desa Karang Anyar dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Karang Anyar Huta IX Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Karang Anyar Huta IX Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui Faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Desa Karang Anyar dalam pengembangan Objek Wisata Di Desa Karang Anyar Huta IX Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

1.4 Manfaat Penelitian

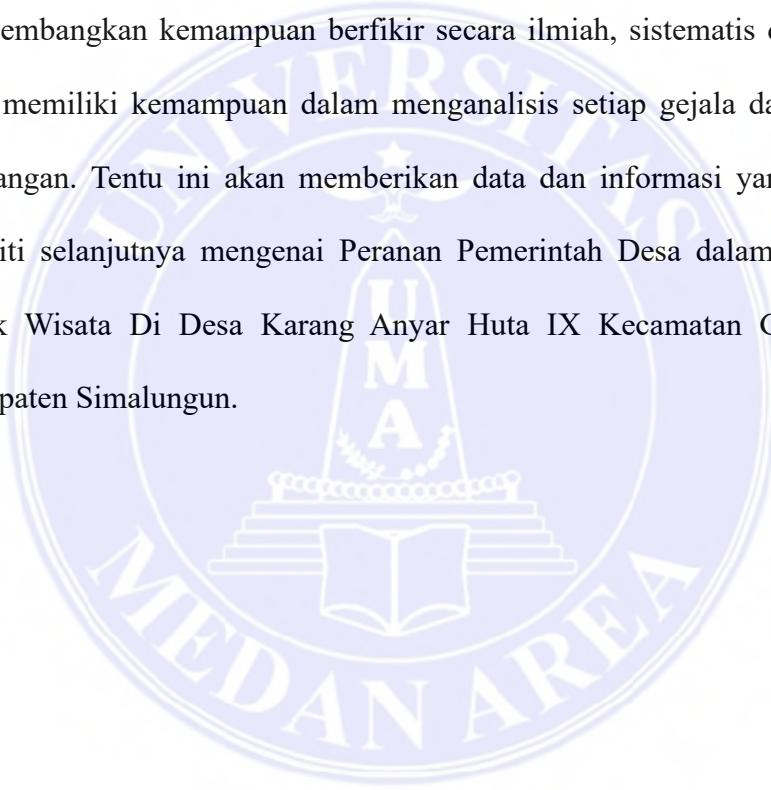
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperluas wawasan pada penelitian dan dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama peneliti kuliah di jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial

Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Administrasi Publik, yang bertaitan dengan Peranan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis bagi penulis, berguna sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir secara ilmiah, sistematis dan metodologis serta memiliki kemampuan dalam menganalisis setiap gejala dan permasalahan dilapangan. Tentu ini akan memberikan data dan informasi yang berguna bagi peneliti selanjutnya mengenai Peranan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Karang Anyar Huta IX Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan

Peranan merupakan sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa pernyataan tersebut berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia. Menurut (Soekanto, 2001) peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan peranan. Meskipun kedudukan dan peranan memiliki perbedaan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena satu bergantung pada yang lain.

Peranan juga memiliki dua arti, yakni mencakup berbagai macam peranan yang muncul dari pola pergaulan hidup individu, yang pada gilirannya menentukan apa yang dilakukan seseorang dalam masyarakat dan peluang yang diberikan masyarakat kepadanya. Peranan merupakan serangkaian perilaku yang terstruktur, yang muncul sebagai akibat dari posisi atau jabatan tertentu, atau karena adanya suatu peran yang mudah dikenali dalam suatu organisasi. Kepribadian seseorang juga dapat mempengaruhi cara peranan tersebut dijalankan. Peranan muncul karena individu menyadari bahwa ia tidak bekerja sendirian, melainkan dalam suatu lingkungan yang memerlukan interaksi dengan berbagai pihak. Lingkungan ini bersifat luas dan beragam, dengan karakteristik yang berbeda-beda. Meskipun demikian, esensi dari peranan yang dijalankan pada dasarnya tetap sama (Thoha, 2002).

(Berry, 2003) mendefinisikan peranan sebagai serangkaian harapan yang diterapkan pada individu yang memegang kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan ini merupakan refleksi dari norma-norma sosial yang ada, sehingga peranan tersebut ditentukan oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks peranan, terdapat dua jenis harapan, yaitu harapan yang dimiliki oleh individu yang memegang peran terhadap masyarakat, serta kewajiban yang harus dijalankan oleh individu tersebut. Berdasarkan pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa peranan adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang melekat pada posisi atau jabatan yang diembannya.

Mintzberg dalam (Thoha, Kepemimpinan Dalam Manajemen, 2019) terdapat tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu :

1. Peran Antarpribadi (*Interpersonal Role*) :

- a. Tokoh : Pemimpin mewakili organisasi dalam situasi formal.
- b. Pemimpin : Atasan berhubungan dengan bawahan untuk memotivasi, mengembangkan, dan mengendalikan tim.
- c. Pejabat Perantara : Atasan berinteraksi dengan rekan, staf, dan pihak eksternal untuk membangun hubungan yang mendukung organisasi.

2. Peran Informasi (*Informational Role*) :

- a. Pemantau : Atasan aktif mengumpulkan dan memantau informasi yang relevan.
- b. Diseminator : Atasan menyebarkan informasi penting kepada anggota tim.

- c. Juru Bicara : Atasan menyampaikan informasi organisasi kepada pihak eksternal.
3. Peran Pengambil Keputusan (*Decisional Role*) : Atasan terlibat dalam pembuatan strategi dan perencanaan organisasi.

Levinson dalam (Sosiologi Suatu Pengantar, 2013) mengemukakan peranan mencakup dari tiga hal antara lain :

1. Norma-norma yang mengatur kedudukan seseorang dalam masyarakat.
2. Konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam organisasi.
3. Perilaku individu yang berperan penting dalam struktur organisasi.

(Sutarto, 2009) mengatakan bahwa peran itu sendiri terdiri dari tiga komponen penting, yaitu:

1. Konsepsi peran, yaitu : Kepercaya seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu kejadian tertentu.
2. Harapan peran, yaitu : harapan orang lain kepada seseorang yang menduduki posisi tertentu tentang bagaimana seharusnya ia bertindak.
3. Pelaksanaan peran, yaitu : sikap sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa peran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukan (status) yang melekat padanya, dengan menjalankan fungsi yang sesuai dengan posisinya. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang ada, dan oleh

karena itu, individu tersebut berusaha untuk selalu tampil "kompeten" serta dipersepsikan oleh individu lainnya sebagai seseorang yang tidak menyimpang dari sistem harapan yang berlaku dalam masyarakat.

Adapun pembangian peran menurut (Soekanto, 2001) peran dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif diartikan sebagai pengurus, pejabat, dan lainnya yang memiliki peran aktif sebagai anggota kelompok karena berpartisipasi dalam aktivitas kelompok.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif merupakan anggota kelompok yang memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat terhadap kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif merupakan sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan peluang.

Dari beberapa penjelasan teori diatas, maka peran seseorang atau kelompok sangat penting bagi masyarakat, khususnya menyangkut keterlibatan pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata di Desa Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

2.2 Pengembangan

Secara *etimologi*, pengembangan berasal dari kata "pengembang," yang berarti suatu proses, cara, atau perbuatan yang dilakukan bersama oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Secara *terminologi*, pengembangan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi perubahan lingkungan internal maupun eksternal melalui pendidikan dan pelatihan. Sementara itu, menurut Malayu Hasibuan dalam (Larasati, 2018), pengembangan merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan melalui pendidikan dan latihan.

Pengembangan adalah suatu langkah atau strategi yang diterapkan untuk memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi objek wisata dan daya tarik wisata, sehingga dapat menarik minat wisatawan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar serta pemerintah. (Paturusi, 2001) dalam (Rohani Inta Dewi, 2024) Pengembangan merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau Perusahaan termasuk pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan.

Sugiyono yang dikutip dalam (Isnani Sara Aprili, 2020) mengemukakan bahwa metode penelitian pengembangan digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifannya, yang melibatkan analisis kebutuhan untuk menghasilkan

produk tersebut. Kemudian menurut Sujadi dalam (R.Ichsan Andi Wibowo, 2020) mengatakan penelitian dan pengembangan adalah proses untuk mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan.

Iskandar Wiyokusumo dalam (Eunike Awalla, 2018) mengatakan bahwa Pengembangan adalah upaya pendidikan, baik formal maupun non-formal, yang dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab untuk memperkenalkan, menumbuhkan, dan mengembangkan kepribadian, pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan sesuai potensi individu, dengan tujuan meningkatkan kualitas diri dan mencapai kemampuan manusiawi yang optimal serta kemandirian pribadi. Dalam (Suryani, 2023) Pengembangan adalah upaya untuk mempersiapkan pegawai agar lebih bertanggung jawab dan memiliki peluang karir yang lebih baik dalam perusahaan atau organisasi. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah usaha yang dilakukan secara terarah dan terencana untuk menciptakan dan memperbaiki produk, sehingga semakin bermanfaat dalam meningkatkan kualitas dan menciptakan mutu yang lebih baik.

2.2.1 Pengembangan Objek Wisata

Objek wisata merupakan semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang digunakan dan dikembangkan sehingga memiliki daya Tarik wisata dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Menurut

(Adisasmita, 2010) dalam (Eet Saeful Hidayat, 2020) mengatakan bahwa Objek wisata adalah tempat yang menarik bagi wisatawan, baik karena keindahan alam maupun buatan, seperti pegunungan, pantai, flora dan fauna, situs bersejarah, serta budaya dan atraksi khas lainnya. Ini mencakup lokasi atau kondisi alam yang memiliki daya tarik wisata yang dikembangkan untuk kunjungan.

(Isdarmanto, 2017) mengatakan bahwa pariwisata bertujuan untuk mengisi waktu luang, bersenang-senang, bersantai, belajar, beribadah, dan berolahraga. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat fisik dan psikis, baik sementara maupun jangka panjang, tetapi juga mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Unsur-unsur pariwisata yang mutlak sangat menentukan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah unsur pengelolaan dari :

1. Daya Tarik Wisata (*Attractions*)

Setiap destinasi pariwisata memiliki daya tarik yang berbeda-beda, tergantung pada potensi yang dimiliki. Berikut adalah beberapa jenis daya tarik wisata yang umumnya ditawarkan di destinasi pariwisata:

- a. Daya tarik wisata alam (*natural tourist attractions*) mencakup segala bentuk keindahan yang dimiliki oleh alam, seperti laut, pantai, gunung, danau, lembah, bukit, air terjun, ngarai, sungai, dan hutan.
- b. Daya tarik wisata buatan manusia (*man-made tourist attractions*) mencakup berbagai aspek, seperti daya tarik wisata budaya (*cultural tourist attractions*) yang meliputi tarian, wayang, upacara adat, lagu, dan ritual.

Selain itu, juga terdapat daya tarik yang merupakan hasil karya cipta, seperti bangunan seni, seni pahat, ukir, dan lukisan.

2. Fasilitas dan Jasa Pelayanan Wisata (*Amenities*)

Amenitas merujuk pada fasilitas yang mendukung kebutuhan wisatawan di destinasi, seperti akomodasi, restoran, toilet umum, tempat parkir, klinik kesehatan, dan sarana ibadah. Fasilitas ini perlu disesuaikan dengan kondisi destinasi dan kebutuhan wisatawan, namun tidak semua amenitas harus berada dekat dengan atraksi utama, seperti hotel atau restoran yang terpisah dari destinasi alam atau situs bersejarah. Selain daya tarik wisata, fasilitas pendukung seperti transportasi, akomodasi, dan fasilitas makan-minum juga penting untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, mulai dari keberangkatan hingga kembali ke rumah.

3. Kemudahan untuk mencapai destinasi wisata (*Accsesbility*)

Aksesibilitas berperan penting dalam kepuasan wisatawan, karena kemudahan mencapai destinasi mempengaruhi anggaran dan pengalaman mereka. Ini mencakup transportasi, infrastruktur jalan, dan rambu-rambu yang memudahkan perjalanan. Kurangnya aksesibilitas sering mengurangi minat wisatawan, meskipun banyak destinasi di Indonesia memiliki daya tarik luar biasa. Transportasi yang memadai juga penting, terutama bagi wisatawan yang bergantung pada transportasi umum dan fasilitas publik. Aksesibilitas mencakup semua aspek yang mempermudah perjalanan wisatawan dari awal hingga tujuan.

4. Keramah Tamahan (*Anciliary*)

Keramahan berkaitan dengan kemampuan pengelola destinasi dalam memberikan pelayanan yang baik. Meskipun destinasi memiliki atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, pengelolaan yang efektif sangat penting agar destinasi tidak terabaikan. Organisasi pengelola bertujuan memberikan manfaat bagi semua pihak terkait dan menciptakan citra positif yang mendukung pengembangan serta pemasaran destinasi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam melakukan pengembangan kepariwisataan, antara lain :

1. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.
2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum
3. Memelihana dan mengembangkan serta melestarikan asset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan asset potensial yang belum tergali
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencehan dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi Masyarakat luas.

(Lasmaria Situmorang, 2024) mengatakan pengembangan pariwisata bertujuan memberikan manfaat bagi wisatawan dan masyarakat setempat, dengan memanfaatkan

sumber daya alam, budaya, dan seni melalui pendekatan terpadu yang mencakup pengembangan produk pariwisata dan pemberdayaan masyarakat local.

2.3 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Muhammad Mu'iz Raharjo, 2021). Dalam undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa menjelaskan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan menurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena masyarakat desa tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa pemerintah desa.

(Muhammad Mu'iz Raharjo, 2021) mengatakan Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa berdasarkan asas-asas berikut:

1. Asas kepastian hukum, Berpegang pada peraturan perundang-undangan, kepantasan, dan keadilan dalam kebijakan pemerintahan desa.
2. Asas tertib penyelenggara pemerintahan, Menciptakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengelolaan pemerintahan desa.
3. Asas tertib kepentingan umum, Mengutamakan kesejahteraan umum melalui pendekatan aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas keterbukaan, Memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan transparan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Asas proporsionalitas, Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Asas profesionalitas , Mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan.
7. Asas akuntabilitas, Menuntut pertanggungjawaban atas setiap kegiatan pemerintahan desa sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Asas efisiensi, Memastikan setiap kegiatan sesuai dengan tujuan dan perencanaan yang telah ditetapkan.
9. Asas efektivitas, Menilai bahwa kegiatan yang dilaksanakan mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat desa.
10. Asas kearifan lokal, Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa dalam kebijakan yang ditetapkan.
11. Asas keberagaman, Menghindari diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu dalam pemerintahan desa.
12. Asas partisipatif, Melibatkan dan mendorong keterlibatan lembaga dan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Desa atau disebut dengan Pemerintah Nagori seperti yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun nomor 2 tahun 2016 tentang Nagori Pasal 1 ayat 7 mengatakan bahwa Pemerintahan Nagori adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam Pasal 1 ayat 9 mengatakan bahwa kewenangan Nagori meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Nagori, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah Desa atau disebut Pemerintah Nagori memiliki dua kewenangan yakni kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagori. Menurut (Supriyanto, 2020) kewenangan yang didasarkan pada hak asal-usul merujuk pada kekuasaan yang diperoleh melalui garis keturunan atau tradisi yang telah ada sejak lama dalam suatu komunitas. Ini menghasilkan legitimasi sosial yang solid bagi pemimpin atau lembaga tertentu. Kemudian (Sihombing, 2018) mengatakan bahwa kewenangan lokal berskala Nagori merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah Desa dalam mengelola sumber daya dan menjalankan pemerintahannya. Kewenangan ini mencakup proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Nagori Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagori Di Kabupaten Simalungun, menyebutkan sebagai berikut :

1.Kewenangan Nagori berdasarkan hak asal-usul meliputi :

- a. Sistem organisasi masyarakat adat
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat
- d. Pengelolaan tanah kas Nagori

- e. Pengembangan peran masyarakat Nagori

2. Kewenangan lokal berskala Nagori meliputi :

- a. Pengelolaan pasar Nagori
- b. Pengelolaan tempat pemandian umum
- c. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Nagori
- d. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu dan puskesmas pembantu
- e. Pengelolaan olahraga Nagori
- f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Nagori
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
- h. Pengembangan tata ruang dan eta sosial Nagori
- i. Pengelolaan perpustakaan Nagori dan taman bacaan
- j. Pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Nagori
- k. Pengelolaan sarana dan prasarana
 - l. Pengelolaan usaha jasa skala Nagori
 - m. Pengelolaan transportasi skala Nagori
 - n. Pengelolaan embung Nagori
 - o. Pengelolaan sampah Nagori
 - p. Pengelolaan jalan umum Nagori
 - q. Pengelolaan air minum berskala Nagori dan usaha pembuatan jamban berskala Nagori
 - r. Pengelolaan pertanian,perkebunan dan peternakan skala Nagori
 - s. Pembuatan jalan Nagori maupun jembatan Nagori antar permukiman ke wilayah pertanian, dan
 - t. Pengelolaan tempat pemakaman umum

2.3.1 Peranan Pemerintah Desa

Pemerintah Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya melaksanakan pengembangan objek wisata dan menciptakan infrastruktur yang mendorong inisiatif dan swadaya masyarakat pedesaan. Hal ini dilakukan melalui pesan pembangunan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menyebarluaskan aspirasi masyarakat. Menurut (Wibowo, 2020) menjelaskan bahwa peran pemerintah desa antara lain sebagai berikut :

1. Pengelolaan sumber daya : Ini dilakukan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan budaya yang ada, guna menarik minat wisatawan.
2. Fasilitas masyarakat : Upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata, melalui pelatihan dan pemberdayaan.
3. Promosi objek wisata : Strategi yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas objek wisata, agar lebih dikenal dan menarik lebih banyak pengunjung.
4. Pengawasan dan regulasi:Tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan objek wisata berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam pengembangan objek wisata, termasuk mengelola sumber daya, memfasilitasi masyarakat, serta mengawasi agar pengelolaan berjalan sesuai aturan. Selain itu, mereka juga berperan dalam mempromosikan objek wisata untuk meningkatkan aksesibilitas dan jumlah pengunjung. Dalam (Nurcholis, 2011) Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembagunan, dan kemasyarakatan antara lain :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Pemusyawaratan Desa)
2. Mengajukan rancangan peraturan desa
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan dari BPD (Badan Pemusyawaratan Desa)
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina perekonomian desa
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menurut (Tjokroadmidjojo, 2000) dalam (Diah Mariatul Restia, 2024) mengemukakan kepala Desa memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata di daerahnya, dalam pengembangan objek wisata yang terdiri dari beberapa bagian, yakni :

1. Motivator

Kepala Desa berperan penting sebagai motivator dalam pengembangan pariwisata untuk memastikan keberlanjutan usaha sektor pariwisata. Sebagai

lembaga yang memiliki legitimasi dan kekuasaan, pemerintah daerah memiliki posisi strategis untuk mendorong pihak-pihak terkait dalam meningkatkan potensi pariwisata di wilayahnya. (B.uno, 2007) mengatakan motivasi dapat dipahami sebagai dorongan yang bersumber dari baik dalam diri maupun dari luar individu. Motivator dalam pengembangan objek wisata adalah pihak yang mendorong pertumbuhan dan kesuksesan destinasi wisata, baik melalui faktor intrinsik (keinginan untuk menjelajah) maupun ekstrinsik (promosi dan fasilitas). Memahami motivator ini membantu pemangku kepentingan merancang strategi pemasaran dan pengelolaan yang efektif. Inovasi, pariwisata berkelanjutan, pelatihan, serta dukungan pemerintah juga berperan penting dalam memastikan pengembangan wisata yang menguntungkan dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan pemangku kepentingan.

2. Fasilitator

Fasilitator adalah individu yang berperan sebagai pemimpin dalam menjalankan fungsi pemerintah. Peran Kepala Desa sebagai fasilitator adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam proses pembangunan Desa. Kepala Desa berfungsi sebagai fasilitator dalam memberikan bantuan berupa penyediaan sarana dan prasarana serta menjadi narasumber yang efektif dalam menghadapi permasalahannya. Dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, kepala desa dapat mendukung dan mendorong pelaksanaan pembangunan Desa, termasuk dalam hal sarana dan prasarana.

3. Mobilisator

Mobilisator adalah individu yang berfungsi sebagai penggerak atau pengarah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa demi kepentingan bersama. Sebagai mobilisator, Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat agar melakukan tindakan nyata dalam proses pembangunan Desa. Kepala Desa berperan mengkoordinasikan perangkat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan, bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, dan pelaporan pembangunan, serta mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan Anggaran Pendapatan Desa (APD).

2.4 Pelayanan Publik

Istilah "pelayanan" dalam bahasa Inggris adalah "*service*". Menurut (Moenir, 2002) dalam (Lailul Mursyidah, 2020), pelayanan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan dasar tertentu, di mana tingkat kepuasan hanya dapat dirasakan oleh pihak yang melayani atau yang dilayani, tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna. Istilah "*public*" berasal dari bahasa Inggris, yang berarti umum, masyarakat, atau negara. Kata "publik" telah diterima sebagai bagian dari bahasa Indonesia baku, dengan arti umum, orang banyak, atau ramai. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam (Muhammad Fitri Rahmadana, 2020) Tujuan utama pelayanan publik adalah untuk memberikan kepuasan serta layanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, kualitas pelayanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003, mengenai pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Penyelenggara pelayanan publik adalah Instansi Pemerintah.
3. Instansi Pemerintah yaitu sebutan kolektif meliputi satuan kerja satuan organisasi Kementerian, Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah.
4. Unit penyelenggara pelayanan publik yaitu unit kerja pada instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik.
5. Pemberi pelayanan publik yaitu pejabat/ pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penerima pelayanan publik merupakan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima pelayanan dari instansi pemerintah.

2.4.1 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Menurut buku (Lailul Mursyidah, 2020) Pelayanan publik adalah hak setiap anggota masyarakat yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kesederhanaan, keamanan, kepastian waktu, kejelasan, tanggung jawab, akurasi, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana, kesopanan dan keramahan,

kenyamanan, serta kedisiplinan. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek, antara lain:

1. Kepastian hukum: Adanya peraturan yang memastikan pelayanan sesuai kebutuhan dan keadilan masyarakat.
2. Keterbukaan : Kemudahan akses informasi layanan bagi penerima pelayanan.
3. Partisipatif : Mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan mereka.
4. Akuntabilitas : Proses pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.
5. Kepentingan umum : Pelayanan harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan golongan atau individu.
6. Profesionalisme : Penyelenggara pelayanan harus kompeten dalam bidangnya.
7. Kesamaan hak : Pelayanan harus diberikan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau status ekonomi.
8. Keseimbangan hak dan kewajiban : Pemenuhan hak harus seimbang dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi dan penerima pelayanan.

2.5 Regulasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

29
Document Accepted 5/12/25

Regulasi merupakan suatu aturan atau kesepakatan yang dibentuk oleh pihak-pihak tertentu atau pemerintah di suatu Daerah yang bertujuan untuk mengatur suatu hal agar menjadi lebih tertib dan baik (Farhan Muhammad Naufal, 2022). Dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatra Utara Tahun 2017-2025 yang mencakup tentang :

1. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
2. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait Kepariwisataan.
3. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
4. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian
5. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Alesandro Pendong, Frans Singkoh, Fanley Pangemanan “Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Gunung Payung di Desa Poopo, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan”	Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Desa Poopo telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan daya tarik wisata di Gunung Payung. Beberapa inisiatif tersebut mencakup pertunjukan tarian budaya lokal, penyediaan transportasi sewa sepeda motor untuk mempermudah perjalanan wisatawan, serta menawarkan akomodasi di rumah warga agar pengunjung merasa lebih nyaman. Selain itu, pemerintah juga telah membangun fasilitas umum seperti area parkir dan memperbaiki jalan-jalan, sehingga mempermudah akses ke lokasi wisata.	Fokus lokasi Penelitian terdahulu ini secara spesifik berfokus pada pengembangan pariwisata di Gunung Payung, Desa Poopo, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan berfokus pada pengembangan objek wisata di Desa Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun

No.	Penulis, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
2.	Amzar Ardiyansyah, Ida Hanifa, dan Ida Nadira “Peranan Pemerintah Aceh Terhadap Pembangunan Pariwisata Halal Di Era Globalisasi”	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni, Yuridis Normatif	Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk mengelola pariwisata halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,. Di tengah perkembangan globalisasi, Pemerintah Aceh dihadapkan pada tantangan, termasuk ancaman dari peraturan luar dan budaya asing yang berpotensi mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh bertanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum kepada wisatawan, melindungi hak-hak masyarakat, serta memberikan informasi dan pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah perbedaan fokus lokasi, dan metode penelitian ini : Menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang- undangan dan kebijakan publik sedangkan pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

32
Document Accepted 5/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

No.	Penulis, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
3.	Rahmad Purwanto W, Chistine Diah W “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Tunjungan Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora”	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	<p>Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Desa Tunjungan berhasil menjadi penggerak dalam pengembangan desa wisata, terutama dengan melibatkan lembaga-lembaga masyarakat setempat. 2. Potensi utama yang dapat menarik wisatawan, baik lokal maupun regional, meliputi tujuh objek wisata, dengan Waduk Ngreneng, kebun buah-buahan, dan kuliner khas Desa Tunjungan sebagai daya tarik utamanya. 3. Partisipasi masyarakat, melalui Pokdarwis dan Pokmas, sangat penting untuk keberlanjutan desa wisata. Kerja sama antar desa wisata dan promosi melalui kalender acara dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dimana lokasi penelitian ini terletak pada Desa Tunjungan Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora

No	Penulis, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
4.	Ni Kadek Ristini, Made Emy Andayani Citra “Peranan Desa Adat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Penglipuran”	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode empiris pendekatan deskriptif analitik	Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: 1. Pengelolaan desa wisata di Desa Adat Penglipuran diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali, serta oleh awig-awig Desa Penglipuran. Namun, terdapat tantangan dalam pengelolaan desa wisata seperti pada saat Covid-19. 2. Pengembangan desa wisata di Desa Adat Penglipuran dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui konsep Tri Hita Karana, yang mencakup harmonisasi, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian. Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan tahap: penyadaran, pengkpasitasan, dan pemberdayaan.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, metode penelitian dan subjek penelitian dimana penelitian ini menjadikan Desa adat sebagai subjek.

No.	Penulis, Judul Penelitian	Metode Penlitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
5.	Carol Ratna Alyssa Nainggolan, Fitriyah, dan Supratiwi “Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Samosir (Studi pada Kampung Ulos Hutaraja)”	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif	Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Samosir lebih dominan sebagai dinamisator dalam pengembangan pariwisata di Kampung Ulos Hutaraja. Pemerintah juga berperan sebagai motivator dan fasilitator, peran dinamisator lebih terlihat dalam upaya mendorong sektor pariwisata. Sebagai fasilitator, pemerintah menghadapi kendala seperti kurangnya pendampingan rutin dan pemeliharaan fasilitas yang memadai. Kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan pihak ketiga, seperti Bank Indonesia dan perguruan tinggi, menunjukkan komitmen dalam pembangunan.	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, lokasi penelitian ini terletak di Kampung Ulos Hutaraja di Kabupaten Samosir

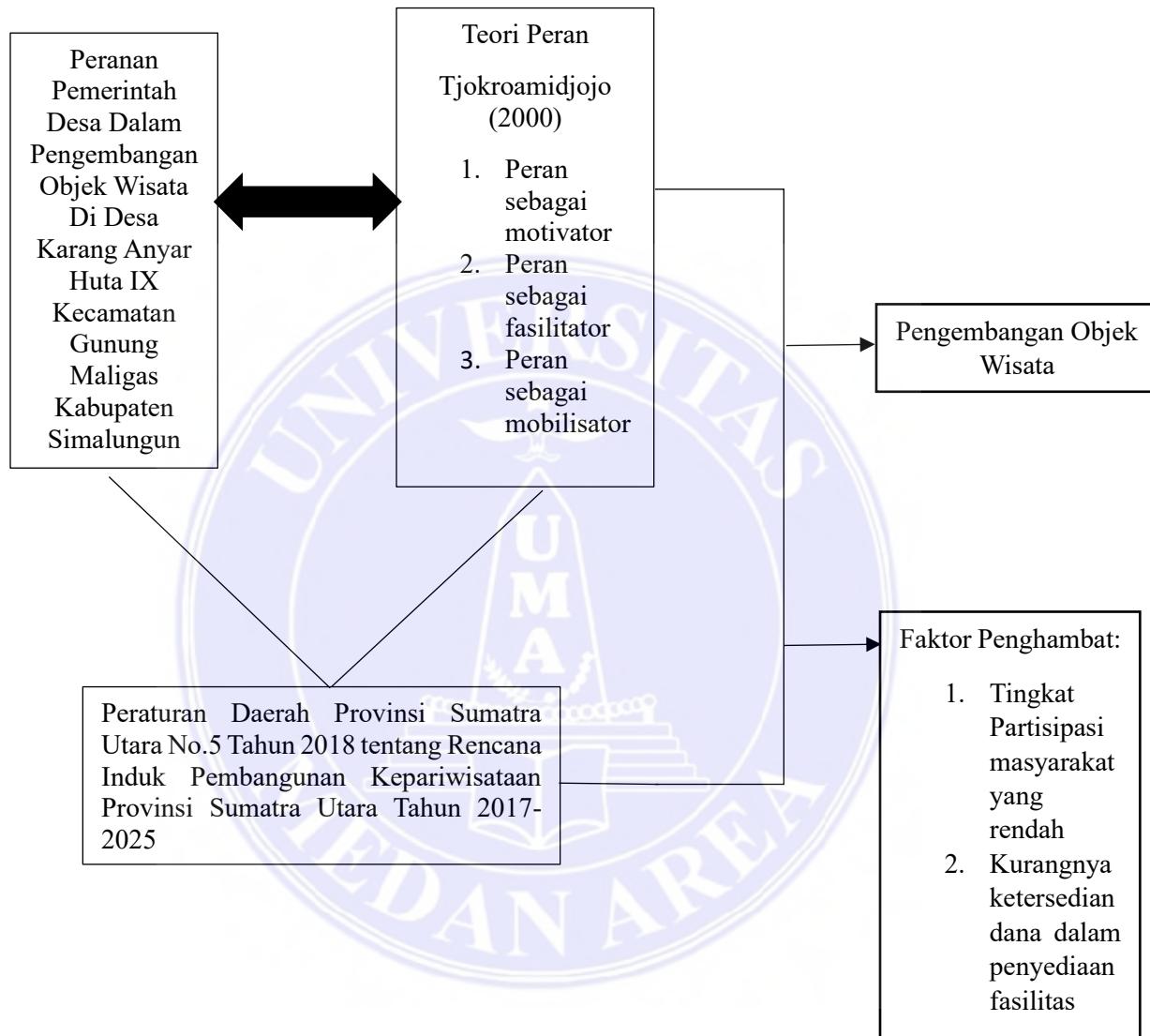
Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah penelitian ini berfokus pada pengembangan objek wisata di Desa Karang Anyar yang belum dilaksanakan oleh lima penelitian terdahulu. Teori pada penelitian ini juga berbeda dari penelitian terdahulu, dimana dalam lima penelitoian tersebut masih ada yang tidak menggunakan teori peran menurut Tjokroamidjojo. Perbedaan lokasi pada penelitian ini juga berbeda dari lima penelitian terdahulu selain itu jumlah informan juga berbeda. Adapun persamaan peneliti dan penelitian terhadulu dalam teknik pengumpulan data seperti wawancara, dokumentasi dan observasi.

2.7 Kerangka Berpikir

(Sugiyono, 2013) Kerangka berpikir adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dan faktor-faktor yang menjadi fokus penelitian. Kerangka ini menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti, baik independen, dependen, moderator, maupun intervening. Penjelasan ini bertujuan untuk menunjukkan relevansi variabel dalam konteks penelitian dan merumuskan paradigma penelitian yang menjadi dasar desain penelitian. Meskipun penelitian fokus pada satu variabel, peneliti tetap perlu memberikan deskripsi teoritis yang mendasari pengukuran variabel tersebut untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kerangka berpikir inilah fokus utama yang nantinya akan peneliti bahas pada penelitian observasi seperti pada gambar 3. Dimana penelitian ini menggunakan teori Tjokroamidjojo (2000) yang memiliki tiga indikator seperti, peran sebagai motivator, peran sebagai fasilitator, dan peran sebagai mobilisator. Indikator tersebut akan berkaitan dengan permasalahan yang

akan diteliti yaitu mengenai pengembangan objek wisata serta faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata di Desa Karang Anyar Kabupaten Simalungun.



Gambar 3. Kerangka Berfikir

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2013) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena, peristiwa, atau situasi dengan cara yang mendalam dan menggunakan pendekatan bersifat kualitatif seperti wawancara, observasi atau dokumen. Menurut David (2004) dalam buku (Feny Rita Fiantika, 2022) Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena dalam konteks alamiahnya. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang mengutamakan pengukuran angka dan statistik, metode ini lebih menekankan pada interpretasi, pemahaman konteks, serta makna subjektif yang terkandung dalam suatu peristiwa atau pengalaman.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan manusia, sosial, atau budaya. Pendekatan ini memberikan ruang untuk menggali kompleksitas dan konteks yang tidak selalu dapat diukur secara numerik, serta memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi lebih luas dari realitas sosial yang ada. Tujuan utama penggunaan metode kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek kompleks kehidupan manusia. Dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen utama, metode ini

memungkinkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan kontekstual. Keunggulan metode kualitatif terletak pada kemampuannya untuk menggali persepsi, makna, dan pengalaman subjek penelitian. Fleksibilitas metode ini memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan dan mengubah fokus penelitian seiring dengan berkembangnya temuan awal yang diperoleh (Dr. Arif Rachman, 2024).

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Desa Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. Lokasi objek wisata Karang Anyar dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :



Gambar 4. Lokasi Objek Wisata Karang Anyar

Sumber : Google Maps, 2024

3.2.1 Waktu Penelitian

Tabel 4. Waktu penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Tahun										
		Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2024	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Agust 2025
1.	Pengajuan Judul											
2.	Penyusunan Proposal											
3.	Seminar Proposal											
4.	Penelitian											
5.	Seminar Hasil											
6.	Perbaikan Skripsi											
7.	Sidang Meja Hijau											

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

3.3 Informan Penelitian

Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan penulisan. Menurut (Sugiyono, 2015) Teknik *purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu mengenai apa yang kita harapkan dan yang paling menguasai sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi yang diteliti.

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari

dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan *teknik purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Berikut informan atau narasumber yang diperlukan untuk penelitian yang akan dilakukan di Desa Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun ini agar diperoleh data yang lebih tepat dan lebih mendalam. (Suyanto, 2005) dalam (Sandi Hesti Sondak, 2019) informan dapat dibagi menjadi tiga antara lain:

1. Informan Kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan Utama yaitu yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan Tambahan yaitu yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Tabel 5. Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan	Jenis Informan	Jumlah Informan
1.	Bapak Safi'I Ma'roef	Kepala Desa Karang Anyar	Informan Kunci	1
2.	Jumali	Ketua BUMNAG Anyar Lestari	Informan Utama	1
3.	Ibu Jaliah Ibu Sarivah Ibu Latifah	Masyarakat Desa, Penjual di objek wisata, pengunjung	Informan Tambahan	3

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan berbagai jenis informasi yang relevan, antara lain:

1. Data Primer

Data primer merupakan pengumpulan informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya dengan tujuan tertentu dalam penelitian. Metode untuk mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada umumnya data ini merupakan data mentah dan memerlukan pengelolaan lebih lanjut. Dengan menggunakan data primer keaslian hasil penelitian dapat ditingkatkan karena informasi tersebut diperoleh dari pengalaman langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti yang dimana data sekunder merupakan pelengkap dari data primer untuk membantu peneliti menjawab pertanyaan yang mungkin tidak sepenuhnya terjawab oleh data primer.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono P. , 2013) menyatakan bahwa Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan terpercaya sehingga Kesimpulan

penelitian tidak akan diragukan kebenarannya. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan melakukan pengamatan atau survey awal pada subjek dan objek penelitian sebelum melaksanakan sebuah penelitian. Pengamatan atau observasi berlaku pada semua jenis penelitian baik itu penelitian yang bersifat kualitatif maupun penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Pengamatan atau observasi merupakan suatu hal penting dalam penelitian. Tanpa dilakukannya pengamatan terlebih dahulu maka seorang peneliti akan kesulitan dalam menentukan subjek, objek, dan variable yang akan dikaji. Hal ini berdampak pada permasalahan yang akan dikaji dalam sebuah penelitian dan akan berjalan sesuai alur penelitian (Feny Rita Fiantika, 2022).

2. Wawancara

(Sugiyono, 2011) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, kemudian menurut (Moeleong, 2018) wawancara adalah suatu percakapan untuk mencapai maksud tertentu. Percakapan itu dapat dicapai oleh pewawancara dan terwawancara (Feny Rita Fiantika, 2022). Wawancara adalah suatu teknik untuk mengumpulkan informasi dari narasumber dengan cara mengajukan pertanyaan. Dengan kata lain, wawancara merupakan kegiatan

tanya jawab antara pewawancara dan narasumber guna memperoleh informasi yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi baik secara visual, verbal maupun tulisan. Menurut (Zuriah, 2009) dalam (Feny Rita Fiantika, 2022) mengatakan bahwa dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lainnya yang berhubungan dengan masalah peneliti. Oleh karena itu, dokumentasi dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya ilmiah dari seseorang.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut (Miles dan Huberman, 1984) dalam (Sugiyono, 2015) mengemukakan tiga Teknik analisis data yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, merangkum, memilih hal-hal pokok, mengklasifikasikan, memfokuskan pada hal-hal penting dalam tema dan pola yang sama. Data yang telah direduksi akan lebih jelas dalam menggambarkan dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan

data pada tahapan selanjutnya dan mencari informasi yang diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keleluasaan serta kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Penyajian Data

Setelah reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan lainnya. Penyajian data pada penelitian kualitatif sering menggunakan bentuk teks naratif yang dilengkapi dengan grafik, matrik, bagan, atau sejenisnya. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami fenomena yang terjadi, merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Tujuan dari penyajian data antara lain untuk mempermudah dalam memahami informasi yang disampaikan, sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan atau pengambilan keputusan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dalam mendukung tahap pengumpulan data yang selanjutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka Kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Peranan pemerintah desa Karang Anyar dalam pengembangan objek wisata sudah cukup baik, dengan kepala desa bertindak sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Melalui pembentukan BUMNag Anyar Lestari, Paguyuban Pedagang, serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pemerintah desa berhasil mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Kolaborasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas wisata, meskipun tantangan terkait infrastruktur dasar dan partisipasi masyarakat yang masih terbatas perlu diatasi. Pendekatan partisipatif dan berkelanjutan ini diharapkan dapat menjadikan pariwisata sebagai pilar ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di desa tersebut.
2. Pengembangan objek wisata di Desa Karang Anyar menghadapi berbagai kendala, termasuk rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan dana, dan kurangnya fasilitas penunjang yang memadai. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi ekonomi pariwisata, dukungan sosial yang terbatas, serta masalah kebersihan dan infrastruktur yang belum optimal menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah desa, BUMNag, masyarakat, dan pengunjung untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan

pengembangan wisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi semua pihak.

5.2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah desa Karang Anyar di harapkan terus memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai potensi ekonomi pariwisata, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam pengelolaan objek wisata serta diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah desa, BUMNag, masyarakat, dan pihak eksternal untuk mengatasi keterbatasan dana, dengan mencari sumber pendanaan alternatif seperti kerjasama antara pemerintah desa dengan sektor swasta yaitu Bank Mestika serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata secara berkelanjutan.
2. Perlu ada upaya lebih intensif dalam meningkatkan fasilitas dasar dan infrastruktur wisata, seperti perbaikan jalan, penambahan tempat sampah, dan area parkir yang lebih luas, guna meningkatkan kenyamanan pengunjung dan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- B.uno, H. (2007). *Teori Motivasi & Pengukurannya*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Berry, D. (2003). *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dr. Arif Rachman, d. D. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
- Feny Rita Fiantika, M. W. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Isdarmanto, S. M. (2017). *Dasar-dasar Kepariwisataan Dan Pengelolaan Destinasi Wisata*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara.
- Lailul Mursyidah, M. I. (2020). *Manajemen Pelayanan Publik*. Sidoarjo, Jawa Timur: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Larasati, S. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV. Budi Utama.
- Muhammad Fitri Rahmadana, A. T.-a. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Muhammad Mu'iz Raharjo, S. M. (2021). *Pokok-pokok dan Sistem Pemerintahan Desa : Teori, Regulasi, dan Implementasi*. PT. Rjagrafindo Persada.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono, P. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, A. (2020). *Kewenangan adat dalam konteks masyarakat adat*.
- Suryani, I. R. (2023). Systematic Literature Review (SLR) : Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Sutarto. (2009). *Dasar-dasar Organisasi* . Yogyakarta: UGM press.
- Thoha, M. (2002). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, M. (2019). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

- Alesandro Pendong, F. S. (2020). Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Gunung Payung Di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol : 2.
- Amar Ardiyansyah, I. H. (2023). Peranan Pemerintah Aceh Terhadap Pembangunan Pariwisata Halal Di Era Globalisasi.
- Bella Pertiwi, I. M. (2023). Dampak Pengembangan Wisata Pemandian Karang Anyar Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. vol : 5 .
- Carol Ratna Alyssa Nainggolan, F. d. (2022). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Samosir (Studi Pada Kampung Ulos Hutaraja).
- Diah Mariatul Restia, H. (2024). Peran Kepala Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata (Studi di Dusun Kebonagung Desa Sukolilo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan). *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol : 4 .
- Eet Saeful Hidayat, R. D. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Eunike Awalla, F. M. (2018). Pengembangan Kompetensi ASN di Kantor BKD Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Isnani Sara Aprili, E. S. (2020). Pengembangan Alat Blok Permainan Bola Voli.
- Lasmaria Situmorang, H. S. (2024). Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Simalungun. *Cendekia Ilmiah*.
- Lia Andriyani, B. M. (2024, Oktober). Peranan Pemerintah Desa Dalam Mendukung Pemberdayaan Anak Berbasis Rumah Belajar Desa Ononamolo Talafu Kabupaten Nias. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*.
- Mirna Yunita, W. S. (2020, Desember 15). Pengembangan Desa Wisata di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Georafflesia*, vol : 5.
- Ni Kadek Ristini, M. E. (2022). Peranan Desa Adat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Penglipuran. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol : 02 .
- R.Ichsan Andi Wibowo, L. S. (2020). Pengembangan Media Pembelajaran Augmented Reality Pada Simulasi Kominukasi Digital Di SMK Muhammadiyah 1 Sukabumi. *Jurnal pendidikan*, 160-167.
- Rahmad Purwanto W, C. D. (2023). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Tunjungan Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. *Jurnal Mimbar Administrasi*, Vol : 20.

- Rohani Inta Dewi, W. K. (2024). Peran Pemerintah Desa Sedau Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Gunung Jae. *Jurnal Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Administrasi Publik*.
- Sandi Hesti Sondak, R. N. (2019). Faktor-Faktor Loyalitas Pengawai Di Dinas Pendidikan Dan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Wibowo. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata : Studi Kasus di Kabupaten x. *Pariwisata dan Ekonomi kreatif*.

Peraturan :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah No.24/1979 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatra Utara Tahun 2017-2025
- Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagori
- Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Nagori Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Beskala Nagori Di Kabupaten Simalungun
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003

Lampiran I Pedoman Wawancara

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DESA KARANG ANYAR HUTA IX KECAMATAN GUNUNG MALIGAS KABUPATEN SIMALUNGUN

PEDOMAN WAWANCARA

1.Pedoman Wawancara Informan Kunci (Kepala Desa Karang Anyar) :

No	Informan	Indikator	Pertanyaan
1.	Informan Kunci	Motivator	<p>1.Bagaimana anda memotivasi masyarakat Desa Karang Anyar Huta IX untuk berpartisipasi dalam pengembangan objek wisata, mengingat pentingnya sektor wisata bagi pembangunan Desa?</p> <p>2.Apa langkah-langkah yang telah anda lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan minat masyarakat terhadap potensi objek wisata di Desa ini?</p> <p>3.Apakah anda melihat adanya hambatan dalam memotivasi masyarakat untuk mendukung pengembangan objek wisata? Jika ya, hambatan apa yang anda hadapi?</p> <p>4.Bagaimana cara anda memastikan bahwa masyarakat merasa terlibat dan memiliki kepemilikan dalam pengembangan objek wisata ini?</p> <p>5.Menurut anda, sejauh mana masyarakat di Desa Karang Anyar Huta IX siap untuk berpartisipasi dalam pengembangan objek wisata, dan apa yang menjadi motivasi utama mereka?</p>
		Fasilitator	<p>1. Sebagai Kepala Desa, bagaimana Anda memfasilitasi kerja sama antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak-</p>

			<p>pihak eksternal dalam pengembangan objek wisata?</p> <p>2. Fasilitas apa saja yang telah disediakan oleh pemerintah desa untuk mendukung pengembangan objek wisata di Desa Karang Anyar Huta IX?</p> <p>3. Bagaimana pemerintah desa mendukung masyarakat dalam hal pelatihan atau peningkatan kapasitas terkait pengelolaan objek wisata?</p> <p>4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan objek wisata, dan bagaimana cara pemerintah desa mengatasi hal tersebut?</p> <p>5. Sejauh mana peran pemerintah desa dalam menyediakan infrastruktur dasar (seperti jalan, listrik, sanitasi) yang dibutuhkan untuk mendukung objek wisata di desa ini?</p>
		Mobilisator	<p>1. Bagaimana Anda menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan promosi objek wisata di Desa Karang Anyar Huta IX?</p> <p>2. Apa langkah-langkah yang telah Anda lakukan untuk melibatkan pihak luar, seperti investor atau lembaga lain, dalam pengembangan objek wisata di desa ini?</p> <p>3. Bagaimana Anda mengorganisir berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan objek wisata, baik itu masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta?</p> <p>4. Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam memobilisasi masyarakat dan pihak lain untuk bekerja sama dalam</p>

			<p>pengembangan objek wisata, dan bagaimana cara Anda menghadapinya?</p> <p>5. Sejauh mana Anda merasa berhasil dalam menggerakkan masyarakat untuk berkolaborasi dalam pengembangan objek wisata? Apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dalam hal mobilisasi ini?</p>
--	--	--	---

2. Pedoman Wawancara Informan Utama (Ketua BUMNAG Anyar Lestari) :

No	Informan	Indikator	Pertanyaan
	Informan Kunci	Motivator	<p>1. Bagaimana BUMNag Anyar Lestari memotivasi masyarakat Desa Karang Anyar Huta IX untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan objek wisata, mengingat peran penting yang dimainkan oleh pemerintah desa dalam hal ini?</p> <p>2. Apa langkah-langkah yang BUMNag ambil untuk mendorong semangat masyarakat desa dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam pengembangan objek wisata, baik dari sisi dukungan pemerintah desa maupun faktor penghambat lainnya?</p> <p>3. Bagaimana BUMNag Anyar Lestari mengatasi rasa pesimis atau kurangnya motivasi dari masyarakat yang merasa bahwa pengembangan objek wisata tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka?</p> <p>4. Dalam pandangan Anda, bagaimana peran pemerintah desa dalam memotivasi masyarakat untuk lebih terlibat dalam pengembangan objek wisata di desa ini?</p> <p>5. Apakah ada inisiatif dari BUMNag untuk mengadakan kegiatan atau pelatihan yang dapat memotivasi masyarakat untuk</p>

			mendalami pengelolaan objek wisata yang ada di desa ini?
		Fasilitator	<p>1. Bagaimana BUMNag Anyar Lestari memfasilitasi kerja sama antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak eksternal (misalnya investor atau LSM) untuk mempercepat pengembangan objek wisata di Desa Karang Anyar Huta IX?</p> <p>2. Apakah BUMNag menyediakan fasilitas atau sumber daya tertentu, seperti pelatihan atau modal usaha, untuk mendukung pengembangan objek wisata, mengingat adanya faktor penghambat yang mungkin timbul dalam proses ini?</p> <p>3. Apa saja fasilitas yang BUMNag bantu sediakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur objek wisata di desa ini, dan sejauh mana bantuan dari pemerintah desa berperan dalam hal ini?</p> <p>4. Bagaimana BUMNag Anyar Lestari membantu masyarakat mengakses informasi tentang peluang pengembangan objek wisata dan program-program pendukung yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemerintah desa?</p> <p>5. Apa kendala yang dihadapi BUMNag dalam memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh dukungan teknis dan finansial dalam pengembangan objek wisata di tengah keterbatasan sumber daya yang ada?</p>
		Mobilisator	<p>1. Bagaimana BUMNag Anyar Lestari berperan dalam menggerakkan masyarakat untuk lebih aktif dalam pengembangan objek wisata, terutama dengan adanya keterlibatan pemerintah desa dalam hal ini?</p> <p>2. Apakah BUMNag terlibat dalam upaya koordinasi antara pemerintah desa dan</p>

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

92
Document Accepted 5/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

			<p>pihak-pihak luar untuk menarik perhatian atau investasi dalam pengembangan objek wisata, dan bagaimana respon masyarakat terhadap upaya tersebut?</p> <p>3. Bagaimana BUMNag Anyar Lestari mendorong kerjasama antara pemerintah desa dan sektor swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas wisata, mengingat adanya faktor penghambat yang dihadapi?</p> <p>4. Sejauh mana BUMNag Anyar Lestari telah menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan hambatan-hambatan dalam pengembangan objek wisata, baik dari segi ekonomi maupun sosial?</p> <p>5. Bagaimana BUMNag Anyar Lestari menangani konflik atau ketidaksetujuan yang muncul di antara masyarakat atau pihak terkait lainnya terkait pengembangan objek wisata, dan bagaimana pemerintah desa membantu dalam proses ini?</p>
--	--	--	---

3. Pedoman Wawancara Informan Tambahan (Masyarakat Desa, Penjual di Objek Wisata, Pengunjung)

No	Informan	Indikator	Pertanyaan
1.	Mayarakat Desa	Motivator	<p>1. Bagaimana menurut Anda peran pemerintah desa dalam memotivasi masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pengembangan objek wisata di desa ini?</p> <p>2. Apa langkah yang diambil pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat tentang potensi objek wisata di Desa Karang Anyar Huta IX?</p>

			<p>3. Menurut Anda, apa yang mendorong masyarakat desa untuk terlibat dalam pengembangan objek wisata?</p> <p>4. Apakah Anda merasa ada cukup dorongan atau motivasi dari pemerintah desa untuk masyarakat ikut aktif dalam pengelolaan objek wisata?</p> <p>5. Apakah masyarakat merasa terlibat dan dihargai dalam pengembangan objek wisata? Jika tidak, apa yang menurut Anda perlu diperbaiki?</p>
		Fasilitator	<p>1. Apa fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah desa untuk mendukung pengembangan objek wisata di Desa Karang Anyar Huta IX?</p> <p>2. Bagaimana pemerintah desa memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pelatihan atau informasi terkait pengelolaan objek wisata?</p> <p>3. Apakah pemerintah desa menyediakan fasilitas fisik seperti jalan, penerangan, dan tempat umum lainnya untuk mendukung pengembangan objek wisata?</p> <p>4. Apakah ada dukungan dari pemerintah desa dalam bentuk bantuan modal atau akses ke sumber daya lain untuk masyarakat yang ingin berusaha di sektor wisata?</p> <p>5. Bagaimana menurut Anda peran fasilitas yang disediakan pemerintah desa dalam memperlancar pengembangan objek wisata di desa ini?</p>
		Mobilisator	<p>1. Bagaimana pemerintah desa menggerakkan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan objek wisata?</p>

			<p>2. Apakah ada upaya koordinasi dari pemerintah desa dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan objek wisata?</p> <p>3. Bagaimana Anda melihat peran pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan dan pemeliharaan objek wisata?</p> <p>4. Apa tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam sektor wisata?</p> <p>5. Apakah masyarakat merasa ada keinginan yang cukup dari pemerintah desa untuk melibatkan mereka dalam pengelolaan objek wisata secara langsung?</p>
2.	Penjual di objek wisata	Motivator	<p>1. Bagaimana pemerintah desa memotivasi Anda untuk membuka usaha di sekitar objek wisata?</p> <p>2. Apakah pemerintah desa memberikan dorongan kepada para pedagang untuk meningkatkan kualitas produk atau pelayanan di objek wisata?</p> <p>3. Apa yang menurut Anda menjadi alasan penting bagi pedagang untuk mendukung pengembangan objek wisata di desa ini?</p> <p>4. Apakah Anda merasa ada dukungan atau motivasi yang cukup dari pemerintah desa untuk meningkatkan usaha Anda?</p> <p>5. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usaha yang Anda buka di objek wisata, dan bagaimana pemerintah desa berperan dalam hal ini?</p>
		Fasilitator	<p>1. Apakah pemerintah desa menyediakan fasilitas yang mendukung usaha Anda,</p>

			<p>seperti tempat usaha yang layak atau bantuan untuk pengembangan produk?</p> <p>2. Sejauh mana fasilitas umum seperti jalan, parkir, dan fasilitas kebersihan yang disediakan pemerintah desa membantu Anda dalam menjalankan usaha di objek wisata?</p> <p>3. Bagaimana pemerintah desa memfasilitasi pedagang lokal untuk memasarkan produk mereka di objek wisata?</p> <p>4. Apakah Anda merasa fasilitas yang ada di objek wisata cukup untuk mendukung kenyamanan pengunjung dan kemajuan usaha Anda?</p> <p>5. Apa saja fasilitas atau dukungan yang Anda harapkan dari pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas usaha di objek wisata ini?</p>
		Mobilisator	<p>1. Bagaimana pemerintah desa melibatkan pedagang lokal dalam kegiatan atau perencanaan yang terkait dengan pengembangan objek wisata?</p> <p>2. Apakah pemerintah desa mendorong kerjasama antara pedagang dengan pengelola objek wisata atau pihak lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan wisata?</p> <p>3. Bagaimana koordinasi antara pemerintah desa dan pedagang dalam menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan?</p> <p>4. Sejauh mana pemerintah desa berhasil menggerakkan masyarakat untuk berkolaborasi dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan objek wisata?</p>

			5. Apa hambatan yang Anda hadapi dalam bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mendukung pengembangan objek wisata?
3.	Pengunjung	Motivator	<p>1. Bagaimana menurut Anda pemerintah desa memotivasi masyarakat untuk menjaga kelestarian objek wisata yang ada di Desa Karang Anyar Huta IX?</p> <p>2. Apakah Anda merasa ada upaya dari pemerintah desa dalam membangun kesadaran pengunjung untuk berperan aktif dalam mendukung keberlanjutan objek wisata ini?</p> <p>3. Menurut Anda, apakah pemerintah desa cukup memberikan informasi dan dorongan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan objek wisata?</p> <p>4. Apa yang menurut Anda bisa dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan motivasi masyarakat untuk menjaga dan merawat objek wisata ini?</p> <p>5. Apakah pengunjung merasa ada keterlibatan dari masyarakat setempat dalam menjaga objek wisata, dan bagaimana menurut Anda motivasi pemerintah desa dalam hal ini?</p>
		Fasilitator	<p>1. Bagaimana menurut Anda fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa di objek wisata ini, seperti akses jalan, tempat parkir, dan fasilitas umum lainnya?</p> <p>2. Apakah Anda merasa fasilitas yang ada sudah cukup memadai untuk mendukung pengalaman wisata Anda di Desa Karang Anyar Huta IX?</p> <p>3. Apakah pemerintah desa memberikan informasi yang cukup kepada pengunjung</p>

			<p>mengenai objek wisata, seperti tanda petunjuk arah, informasi tentang atraksi, atau kebijakan yang harus dipatuhi pengunjung?</p> <p>4. Sejauh mana fasilitas kebersihan dan kenyamanan yang disediakan pemerintah desa mempengaruhi pengalaman wisata Anda?</p> <p>5. Apakah ada fasilitas tambahan yang Anda rasa perlu disediakan pemerintah desa untuk meningkatkan pengalaman berwisata di objek wisata ini?</p>
		Mobilisator	<p>1. Bagaimana menurut Anda peran pemerintah desa dalam menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam pemeliharaan dan pengelolaan objek wisata?</p> <p>2. Apakah Anda merasa bahwa ada upaya dari pemerintah desa untuk meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan pengunjung dalam menjaga kelestarian objek wisata?</p> <p>3. Bagaimana pendapat Anda mengenai upaya koordinasi antara pemerintah desa dengan pihak-pihak terkait dalam menciptakan pengalaman wisata yang lebih baik?</p> <p>4. Apakah pemerintah desa cukup aktif dalam mengedukasi pengunjung tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian objek wisata?</p> <p>5. Apakah Anda melihat adanya kolaborasi yang cukup antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menjaga dan memelihara objek wisata di desa ini?</p>

Lampiran II Dokumentasi



Gambar 7. Kantor Desa Karang Anyar



Gambar 8. Objek Wisata Karang Anyar



Gambar 9. Wawancara Bersama Informan kunci (Kepala Desa)



Gambar 10. Wawancara Bersama Informan Utama (Ketua BUMNag Anyar Lestari)



Gambar 11. Wawancara Bersama Informan Tambahan (Masyarakat Desa)



Gambar 12. Wawancara Bersama Informan Tambahan (Penjual di Objek Wisata)



Gambar 13. Wawancara Bersama Informan Tambahan (Pengunjung objek wisata)



Lampiran III Surat Izin dan Selesai Riset/Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7360878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 70 / Jalan Sri Setiyu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Surat Izin dan Selesai Riset/Penelitian
Nomor : 085/FIS.0/91.10/1/2025
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 13 Januari 2024

Kepada Yth.
Pimpinan Kantor Panghulu Nagori Karang Anyar
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nurul Musrifah
NIM : 218520022
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Pimpinan Kantor Panghulu Nagori Karang Anyar untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Karang Anyar Huta IX Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

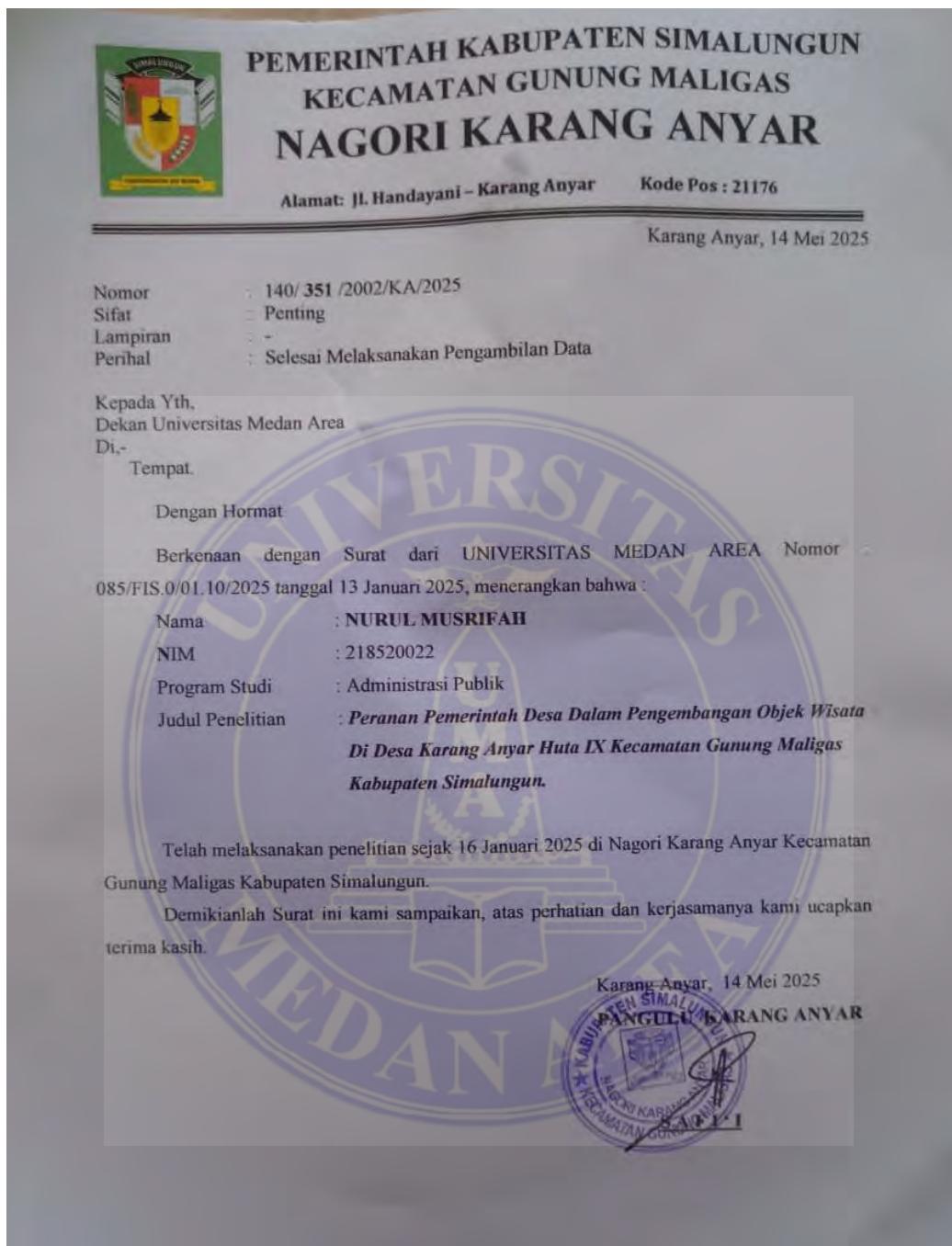
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dr. Wahid Musthafa S, S.Sos, M.IP

Tembusan:

1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



Lampiran IV Regulasi



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

13. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
16. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
21. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
23. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
24. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

105 Document Accepted 5/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/12/25



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

106
Document Accepted 5/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area